

Kebijakan dan Jaringan Bisnis Cina dari Jaman ke Jaman di Indonesia

Retno Andriati
(Dosen Antropologi FISIP Unair; andri_joko@yahoo.com)

Abstract

Trade activity in Indonesia actually has existed since pre-colonial era. Growing process of trade activity has given rise to specific behavior of trade activity and business networking from community. Trader usually have a role in merchant community from various ethnic in different area, both of inland and coastal areas. This study aim to review the proccess of establishing and reinforcing the trade network from various ethnic and between the rulers from era to era in Anthropology perspective. Literature method was used in this study. The results show that the proccess of establishing and reinforcing the trade and business network were done by Chinese. The policy from one era to another era supported the establishment and reinforcement of goods distribution network.

Keywords: trade, merchant, network, Chinese, Indonesia

Abstrak

Aktivitas perdagangan di Indonesia telah ada sejak era pre-kolonial. Dalam perkembangannya telah memunculkan perilaku perdagangan dan jaringan bisnis yang khas dari suatu komunitas. Para pedagang biasanya memiliki peran tertentu dalam komunitas saudagar yang berasal dari berbagai sukubangsa yang berasal dari daerah yang berbeda, baik di daerah pedalaman dan pantai. Studi ini bertujuan untuk mereview proses berdirinya dan penguatan jaringan perdagangan dari anekaeagam sukubangsa dan antara pemegang kekuasaan dari satu jaman ke jaman yang lain dalam sedut pandang Antropologi. Metode penulisan dengan menggunakan penelusuran pustaka. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa proses pendirian dan penguatan perdagangan dan jaringan bisnis telah dilakukan oleh orang Cina. Kancan perpolitikan dari satu jaman ke jaman yang lain telah mendukung berdirinya dan penguatan jaringan distribusi kebutuhan hidup.

Kata Kunci: perdagangan, saudagar, jaringan, orang Cina, Indonesia

Pedagang/pengusaha membangun jaringan sosial perdagangan antar individu, kelompok, etnik, baik dari wilayah sekitarnya atau wilayah Asia lainnya. Aktivitas pelaku ekonomi perdagangan ini dipengaruhi beragam faktor sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pengaruh ini nampak dalam proses tumbuh berkembangnya aktivitas eko-

nomi perdagangan telah melahirkan perilaku ekonomi berdagang tertentu dari kelompok dan jaringan pedagang dan pengusaha. Kekuasaan dan status raja-raja sangat penting dalam tumbuh berkembangnya berbagai jaringan perdagangan dan bisnis di Indonesia dan Asia pada jaman pra kolonial sampai kolonial. Maknanya berbagai strategi perdagangan

yang diterapkan raja dan komunitas pedagang/pengusaha melahirkan budaya berdagang baru (Admosudirdjo, 1983, Weber, 1979, van Leur, 1955).

Berbagai kajian tentang kapitalisme perdagangan menunjukkan munculnya jaringan bisnis perdagangan konvensional pribumi, Cina, orang-orang Eropa dan etnik lain tidak terlepas dari proses awal perdagangan barter lewat jalur laut dari India ke Cina atau sebaliknya. Proses ini semula mengkonstruksi relasi antar etnis, kelas-etnis, antar penguasa/raja-bangsawan berdasar relasi harmoni kemudian berkembang menjadi kompetisi, konflik sampai muncul perang dan berbagai tindakan kekerasan serta monopoli dalam perdagangan. Kajian lain mengkaitkan pengaruh kebijakan intern dari penguasa/politik/pemerintah yang berlaku tiap jaman terhadap kegiatan ekonomi perdagangan dan penentuan nasib peradaban masyarakat. Pendekatan sejarah ini umumnya pesimis dan Eropacentris, yang mengabaikan peran pelaku ekonomi perdagangan di Nusantara dan kurang menghargai peran pedagang Asia karena pendekatan itu berpihak pada kolonial. Kondisi ini mendorong ahli sejarah lain, sosiolog, ahli ekonomi, antropolog mengkaji aktivitas perdagangan secara lebih rinci. Kajian mereka menunjukkan

pengaruh kebijakan perdagangan di Nusantara tidak hanya lokal, regional, nasional melainkan juga internasional. Demikian juga kebijakan negara lain atau internasional berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi perdagangan Nusantara. Akibatnya kekuatan jaringan bisnis tiap etnik umumnya dan Cina khususnya tiap jaman berbeda sejalan dengan variasi aktivitas dan transaksi ekonomi perdagangan, konflik dan aliansi yang terjadi sampai munculnya borjuasi dagang dari kelompok pejabat-pejabat Indonesia, pengusaha pribumi dan Cina. Masalah yang dikaji dengan perspektif Antropologi Ekonomi ini adalah bagaimana proses pembentukan dan penguatan jaringan perdagangan dari berbagai etnik dan antar para penguasa dari jaman ke jaman di Indonesia?

Yang dimaksud kelompok pedagang dalam kajian ini adalah satu kesatuan beberapa pedagang yang menjual barang tertentu. Jaringan bisnis pedagang/pengusaha adalah sekelompok pedagang/pengusaha dari berbagai suku-bangsa/etnis yang memasarkan produk dengan memanfaatkan kelompok sendiri dan jalur distribusi yang dibangun dan dikuasai. Aktivitas jaringan ekonomi perdagangan dari jaman ke jaman ternyata bervariasi. Pada jaman pra kolonial, tiap etnis dari wilayah tertentu

di Asia, seperti Jawa, Bugis, Makasar, Madura, Cina, Arab, India, Melayu dan yang lain mempunyai semangat wira-usaha tinggi dengan saling tukar menukar barang yang berbeda. Kegiatan ekonomi perdagangan ini tumbuh berkembang pada jaman kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Makasar dan Majapahit. Semula orang Cina kurang berperan sebagai pedagang perantara dalam struktur perdagangan pada waktu itu. Sementara peran orang Jawa dan Melayu kuat sekali dalam perdagangan rempah-rempah, struktur perdagangan dan menguasai pelayaran di Nusantara (Schrieke, 1960; Alatas, 1988). Luas wilayah perdagangan tidak hanya lokal tetapi juga internasional. Awal raja di wilayah pedalaman terlibat perdagangan, karena upeti mereka menumpuk dan berlebih. Kondisi ini mendorong para raja membentuk syachbandar di kota tepi pantai guna menukarkan barang upeti dengan barang lain yang diperlukan keluarga raja sendiri atau diperdagangkan di wilayah pedalaman. Syachbandar terdiri dari relasi yang dikenal raja, seperti bangsawan, keluarga dan pedagang-pedagang tertentu (Suryo, 2006). Peran raja sebagai penguasa sangat besar dalam mendominasi perdagangan, sehingga kerajaan pedalaman mengalami masa kejayaan. Mekanisme kerja raja,

syachbandar dan pedagang berdasar kepercayaan yang dibangun raja. Namun ada orang kepercayaan raja memanfaatkan kerjasama dan kepercayaan ini, dengan mencari keuntungan sendiri di luar upah dari raja. Saat keuntungan sudah terakumulasi, mereka berusaha membangun kerajaan sendiri. Proses ini berakibat munculnya kerajaan-kerajaan pantai, yang lebih menguasai perdagangan maritim, baik di Jawa maupun luar Jawa. Akibatnya monopoli raja lama kelamaan di wilayah pedalaman mengalami keruntuhan (Wertheim, 1999). Pedagang juga membeli barang-barang luar yang tidak ada di wilayahnya dan menjualnya kembali di wilayah pedalaman. Jalur perdagangan melewati rumit dan panjang dari asal barang dagangan untuk sampai ke tangan pembeli. Wilayah tertentu berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, seperti pesisir Sumatera, Selat Malaka, Semenanjung Malaya, pesisir utara Jawa, Brunei, Sulu dan Maluku. Para bangsawan Islam Majapahit berdagang pada abad XIV. Pedagang Cina, India, Arab dan Melayu Islam menetap di pesisir dan mendirikan pusat-pusat perdagangan.

Fluktuasi perdagangan, kuatnya jaringan perdagangan dan lalu lintas perdagangan di Asia, serta dinamika mekanisme pasar tersebut, karena relatif

tingginya kompetisi antar raja/penguasa, pengusaha/pedagang dan jaringannya. Perdagangan tumbuh menjadi konflik kepentingan dan kompetisi, yang digerakkan oleh semangat untuk mendominasi dalam ekonomi pasar. Sayangnya proses perdagangan yang semula harmoni ini terganggu ketika orang-orang Eropa, yang diawali Portugis kemudian Inggris, Belanda menginjakkan kakinya di wilayah Nusantara dan mencari hasil bumi sendiri berupa rempah-rempah, karena negaranya dan negara Eropa lain sangat memerlukan rempah-rempah. Kompetisi terjadi dan transaksi ekonomi pedagang di Nusantara mulai terbelenggu ketika orang-orang Eropa berusaha memonopoli perdagangan. Kegiatan perdagangan yang menjanjikan keuntungan ekonomi makin mendorong bangsa Portugis berusaha merebut pelabuhan Melaka. Tujuan menguasai pelabuhan agar barang dagangan cepat sampai ke pembeli tanpa banyak pedagang perantara yang terlibat.

Bangsa Portugis menyadari kekeliruannya setelah melalui proses bahwa menguasai pelabuhan bukan berarti menguasai komunitas pedagang. Ternyata pedagang hanya mau berdagang dengan orang-orang yang telah mempunyai relasi dagang sebelumnya. Mereka secara tidak langsung mengkonstruksikan relasi saling percaya dalam berdagang.

Ketika pelabuhan Melaka dikuasai Portugis, komunitas pedagang yang biasa berdagang di pelabuhan itu pindah dan berdagang lewat wilayah pesisir/pelabuhan lain (Ricklefs, 1991; Scricke, 1960). Dominasi penguasa/raja atau etnik asing mendorong mereka secara sengaja atau tidak disengaja melakukan kerja sama, baik melalui perang penaklukan dan pemaksaan, maupun perjanjian pembagian hasil. Ikatan kerjasama ini dilanjutkan dengan penguatan jaringan perdagangan yang ada dan pembuatan aturan perdagangan yang lebih menguntungkan mereka sendiri. Proses ini menimbulkan monopoli di berbagai wilayah di Nusantara. Di samping itu jalur lalulintas perdagangan memerlukan terjaminnya keamanan, karena muncul perlawanan jaringan perdagangan etnik dan raja/penguasa lain, baik secara terbuka atau perdagangan gelap. Akibatnya penguasaan wilayah teritorial tertentu menjadi penting untuk kelancaran lalulintas perdagangan (Booth, et al, 1988; Wertheim, 1999; Schrieke 1960; van Leur 1955; Atmosudirjo, 1983). Penemuan kapal api sebagai alat transportasi, mempercepat proses distribusi barang. Akibatnya peran Portugis meningkat waktu itu. Namun Portugis tidak bertahan lama dan gagal monopoli. Belanda belajar dari kegagalan Portugis, dengan memeta-

kan potensi wilayah timur terlebih dahulu, membuat deskripsi rinci tentang penemuan-penemuan Portugis, kekayaan Asia, persoalan-persoalan yang ada berkaitan alat transportasi, seperti kapal. Hasil pemetaan ini dijadikan dasar Belanda untuk membuat strategi lebih baik dan kapal lebih bagus, sehingga Belanda lebih berhasil (Scricke, 1960).

Lalu lintas kegiatan perdagangan ini makin berubah, ketika bertambahnya jumlah orang-orang etnis Cina dan Eropa lain juga mulai masuk ke jalur perdagangan di Asia dan berusaha mendominasi pedagang-pedagang Asia. Masuk dan kuatnya peran etnis Eropa di wilayah Melaka dan sekitarnya, bukan karena kemampuan mereka saja, tetapi juga karena jasa besar para penunjuk jalan dari etnis Asia dan raja-raja yang bersekutu dengan mereka. Orang-orang Cina banyak menetap dan melakukan perkawinan campur dengan perempuan penduduk lokal. Jaringan pedagang Cina, Eropa makin berhasil dan kuat. Akibatnya terjadi fluktuasi dalam kegiatan perdagangan di Asia, sehingga pedagang Jawa dan Melayu migrasi dan berdagang ke wilayah Makasar pada waktu itu (Lombart, 2000). Mackie (1998) membuktikan bahwa alasan penting lain, keberhasilan perdagangan orang Cina, karena mereka pandai memanfaatkan

waktu pada abad 12. Ketika mereka berhasil mengembangkan perusahaan besar, posisinya sulit digeser, meskipun pemerintah-pemerintah lokal telah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi mereka. Kemampuan mereka bertransaksi dan menangani hutang piutang sebagai pinjaman kepada orang-orang pribumi serta kekuatan keinginan mereka mengakumulasi modal yang akan dibawa ke negaranya pada abad sebelumnya, membuat posisi mereka mantap dan sulit tergantikan sebagai pedagang perantara di negara-negara Asia Tenggara. Bakat bisnis orang Cina yang didukung oleh kondisi-kondisi dari perkumpulan-perkumpulan Cina dan lembaga-lembaga dagang, menciptakan jalur-jalur kelembagaan yang mempunyai daya tahan terhadap kapitalis lokal yang berusaha menandinginya.

Berdasarkan perspektif Antropologi Ekonomi, sayangnya berbagai kajian kegiatan ekonomi perdagangan pada jaman pra kolonial ini kurang mengkaitkan adanya dinamika dan perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat akibat bergantinya kekuasaan raja yang terus menerus sebagai akibat perebutan barang dan wilayah perdagangan. Ganti raja, ganti kebijakan dan tata aturan, karena masing-masing raja

sebagai penguasa mempunyai motivasi ekonomi, sosial dan politik berbeda yang berdampak pada masyarakat, khususnya bagi pedagang/pengusaha dari berbagai etnis. Tiap kebijakan baru tidak dijelaskan bagaimana proses sosialisasinya. Proses perubahan menunjukkan bahwa sifat perdagangan dan jenis produksi yang diperdagangkan berbeda dan hal ini penting dipahami. Padahal jenis barang dagangan berbeda seiring perubahan sosial budaya, ekonomi dan politik yang terjadi.

Kondisi perdagangan tersebut berlanjut pada jaman kolonial. Berbagai disertasi menunjukkan bagaimana asal usul, tumbuh kembang dan kejayaan etnis Cina dalam perdagangan di Jawa pada jaman kolonial akibat berbagai peraturan dan peluang ekonomi yang dibuat kolonial Belanda. Sekaligus bagaimana kompetisi mereka dengan pedagang pribumi/santri dalam kaitannya gerakan penyebaran dan pengaruh Islam terhadap tumbuh berkembangnya kewirausahaan/perdagangan, proses runtuhnya perdagangan, baik itu perdagangan budak, perdagangan perantara distribusi, perdagangan hasil bumi, tembakau maupun bandar opium yang dikuasai oleh etnis Cina. Belanda melarang penyewaan dan penjualan tanah pertanian di Jawa kepada orang-orang Cina, sehingga orang-orang

Cina bergerak di bidang perdagangan. Ternyata kemampuan berdagang orang Cina terbaca oleh pemerintah kolonial, karena mereka lebih gigih, rajin, ulet, hemat dan dapat memanfaatkan peluang ekonomi secara maksimal. Orang-orang Cina ini terlanjur keluar dari negeri asalnya, maka mereka berusaha survive dengan meningkatkan kesejahteraannya di Jawa dan pulau-pulau lain. Thee Kian Wie (1990) mengatakan orang-orang Cina peranakan berkesempatan memperoleh pendidikan barat seperti bidang kedokteran, perbankan, guru, wartawan dan yang lain. Sementara adanya kemajuan bidang perdagangan dan sektor ekonomi lain, memerlukan bermacam tenaga profesional. Orang-orang Cina yang siap pakai yang telah mengenyam pendidikan barat ini, memenuhi peluang ekonomi tersebut. Fungsi orang-orang Cina sebagai perantara, termasuk pedagang perantara antara perdagangan besar dan kecil. Orang Cina lebih sukses di bidang ekonomi perdagangan perantara dibanding orang pribumi yang bergerak pada perdagangan eceran. Orang Cina mengalami kemunduran dalam perdagangan karena faktor intern mereka sendiri dibanding faktor ekstern, yaitu pengaruh masa krisis perang. Sementara itu VOC terus memperluas kekuasaannya guna mengamankan jalur-jalur perdagangannya. Hal

ini nampak dari serangan-serangan VOC terhadap raja-raja yang menguasai perdagangan melalui syachbandar. Mereka menaklukkan raja-raja dan santri yang lebih dulu menguasai perdagangan perantara, dengan menggantikan dan memperkerjakan orang-orang Cina sebagai pedagang perantara di berbagai wilayah. Orang-orang Cina terus mengembangkan potensi diri, dengan mengambil keuntungan pada tiap kesempatan. Banyak kasus menunjukkan orang-orang Cina menjadi kepala kamar dagang/kapitan di berbagai wilayah, misal Cirebon, Banten, Semarang. Relasi ini tumbuh menjadi dominasi kekuasaan orang-orang Cina terhadap para raja/pangeran dan masyarakatnya. Orang-orang Cina lebih maju dalam perdagangan, karena kemudahan aturan dan hak-hak istimewa yang mendukung dari VOC dan Inggris/orang Eropa. Mereka dipercaya menarik pajak dari orang-orang Jawa. Kejayaan mereka membuat resah dan kecemburuan sosial dari orang-orang Jawa hingga terjadi kasus juga, yaitu gerakan anti Cina dan berujung pembantaian, seperti di Batavia, Yogyakarta, Solo. Proses ini membentuk dan memperkuat identitas ke Cinaan mereka, khususnya Cina peranakan. Namun ada juga proses asimilasi dari orang Cina dengan orang Jawa, meskipun masih ada

pembatas kultural di antara mereka (Carey, 1986).

Seiring makin kuat berkuasanya VOC, maka VOC mempersempit gerak berdagang komunitas pedagang pribumi di Nusantara. Para pedagang hanya boleh berdagang di wilayah lokal/pedalaman saja dan tidak boleh berkeliling lagi tanpa ijin VOC. Akibatnya para santri, yang semula mereka bebas berdagang kemanapun asal mereka mendapat pesanan barang dari relasi yang dikenalnya, sekaligus menyebarkan agama Islam sejak jaman pra kolonial, menjadi terbelenggu. Jika mereka meminta ijinpun, belum tentu diijinkan jika barang dagangan sama. Kegiatan perdagangan ini terganggu, karena kompetisi tidak adil bagi santri dan transaksi ekonomi terbatas. Artinya kelas-kelas pedagang pribumi sebagai penganut Islam paling taat dihalau dari perniagaan laut internasional oleh VOC dan dipaksa menjadi pedagang-pedagang kecil domestik (Geertz, 1982). Sementara itu orang-orang Hindu dipaksa menjadi pegawai yang melayani kepentingan Belanda dan para petani dipaksa menanam tanaman komersial untuk kepentingan ekspor kolonial. Akibatnya banyak orang Jawa dan luar Jawa hanya menjadi pedagang lokal. Proses ini secara historis mendorong

masyarakat cenderung bermental agrarian dan bekerja sebagai pegawai, karena pegawai lebih baik dan prestisius dibanding pedagang (Suryo, 2006).

Para raja atau bangsawan juga mensosialisasi masyarakat lewat utusannya, agar mereka jangan terlibat perdagangan, karena perdagangan identik dengan penipuan. Padahal raja-raja ini melindungi kepentingannya, agar para raja dan penguasa tidak tersaingi pedagang pribumi. Akibatnya pedagang pribumi menjadi pedagang lokal. Akhirnya banyak anggota masyarakat terpengaruh untuk tidak memilih berdagang yang penuh resiko, mengingat berdagang itu tidak selalu untung dan pendapatannya tidak pasti, berbeda dengan pekerjaan sebagai pegawai. Para priyayi juga takut tersaingi karena asal pedagang adalah masyarakat biasa. Jika pedagang sukses berdagang maka mereka menjadi kaya sehingga status sosial ekonominya meningkat di masyarakat. Akibatnya status ekonomi mereka dapat setara atau bahkan mengungguli para priyayi (Suryo, 2006; Lombart, 2000; Geertz, 1982; Burger, 1983). Para raja tetap melakukan perdagangan berskala menengah dan besar pada jaman kolonial ini. Kelompok pedagang raja dan jaringannya memperoleh izin dari VOC, atas dasar kerjasama raja dan VOC. Bahkan para raja/penguasa

berkompetisi melalui perang untuk mempertahankan kekuasaannya dan bekerja sama dengan orang-orang Eropa dan Cina pilihannya, yang juga ingin monopoli barang dagangan tertentu. Akibatnya wilayah Nusantara di bawah Majapahit (wilayah ASEAN sekarang) makin terpecah belah. Para raja dan VOC membuat perjanjian dan kesepakatan pembagian kerja dengan sistem bagi hasil dalam perdagangan. VOC membatasi luas pemasaran barang. Misal pedagang sebagai anak buah Raja Majapahit, Raja Banten atau Raja Bone berlayar dan berdagang ke wilayah Nusantara lain harus mempunyai surat jalan dari VOC. Jika melanggar aturan akan dihukum. Mereka hanya boleh melewati wilayah tertentu saat berdagang dan berdagang barang tertentu.

Burger, Schrieke, Wartheim melakukan studi pada masa Indonesia mengalami transisi. VOC dilawan juga oleh penyelundup (menurut definisi VOC) di Maluku dan Sarekat Islam di Jawa Tengah dan daerah lain, agar mereka berkurang monopolinya. Perdagangan gelap dari penyelundup ini yang tetap membuat perdagangan di wilayah timur berlangsung. VOC berjaya karena bekerjasama dengan Cina dan pribumi. Namun monopoli VOC gagal terus karena nilai rempah sebagai barang dagangan merosot dan tiap abad barang dagangan yang

lebih penting berbeda, demikian juga rute perdagangan internasional, antar pulau dan dalam satu pulau berpengaruh terhadap pengintegrasian ekonomi perdagangan antar wilayah. Proses ini menimbulkan spesialisasi dan perdagangan regional pada taraf cukup tinggi (Howard, 1988; Ricklefs, 1991). Furnivall (1944) mengemukakan bahwa VOC membuat keputusan politik dengan makin mempertajam dan membedakan orang pribumi, kulit kuning/Cina dan kulit putih/Eropa untuk memperkuat kekuasaannya. VOC melakukan pembagian kerja berdasar perbedaan warna kulit. Karakteristik masyarakat Nusantara adalah masyarakat plural, maka bentuk kegiatan ekonominya juga plural. Perbedaan mendasar ini berakibat adanya perbedaan problema yang timbul, yaitu pluralisme problema politik dan ekonomi. Khususnya problema pengorganisasian permintaan pasar dan integrasi politik antar masyarakat dalam satu kerangka kerja sosial. VOC mengelompokkan dan mempekerjakan pribumi di bidang pertanian, perkebunan dan menjadikan mereka pegawai rendahan. VOC lebih menempatkan posisi orang Cina, sebagai sesama pendatang menjadi rekan kerja yaitu sebagai pedagang perantara.

Kajian-kajian khusus jaringan perdagangan Indo-Cina umumnya kurang membedakan antara jaringan bisnis Cina

peranakan/totok pada jaman transisi, padahal secara historis peran ke duanya berbeda dalam berbisnis. Jika hal ini dikaitkan dengan pemikiran Marx dalam aliran Marxisme, Antropologi Ekonomi, bahwa gejala munculnya jaringan bisnis ekonomi dari pedagang Nusantara, Cina dan suku bangsa /etnis lain tidak tumbuh jika sistem sosial tidak mendukung. Untuk itu Twang Peck Yang (2005) menyangkal beberapa kajian bahwa jaringan bisnis etnis Cina lebih menonjol perannya dibandingkan dengan jaringan bisnis Cina totok. Jaringan bisnis Cina totok justru mulai nampak besar peran dan pengaruhnya pada ekonomi perdagangan di Indonesia sejak masa transisi kemerdekaan, tepatnya pada jaman penjajahan Jepang karena ada peluang ekonomi pada masa revolusi. Mereka bekerjasama dalam pertukaran perdagangan dengan orang-orang pribumi revolusioner dan para pejabat pemerintah Indonesia pada waktu itu. Kritik terhadap hasil penelitian tersebut, pendekatan dan analisisnya deskriptif saja serta kurang dilihat dampaknya bagaimana terdominasinya masyarakat dan pedagang pribumi. Prediksi para ahli dengan temuan dan pemikirannya untuk jaman-jaman berikutnya kurang dilakukan. Ternyata jika kita melihat kondisi sekarang konstruksi nilai untuk tidak menjadi pedagang dan bahwa

pribumi itu malas serta kurang berani mengambil resiko tetap terjadi. Mitos pribumi malas berlanjut karena beragamnya etnik dan luasnya wilayah kepulauan Nusantara, membuat rawan konflik dan menjadi warisan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Kondisi ini menciptakan ethnocentrisme masing-masing etnik dan jenis pekerjaan, yang nampaknya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial masyarakat. Jaman Transisi Kemerdekaan, pembinaan dan perlindungan pengusaha pribumi pada jaman transisi dari RIS (Republik Indonesia Sementara) ke demokrasi terpimpin belum menampakkan hasil berarti bagi suksesnya pengusaha pribumi. Bahkan program benteng yang berusaha meminimalkan ketergantungan Indonesia pada asing dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar kurang membawa perbaikan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Gejolak politik waktu itu berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah yang dihasilkan, karena sasaran program penguatan pengusaha pribumi kurang mencapai sasaran dan masih berdasar kepentingan pribadi/golongan. Geertz (1973) menegaskan bagaimana dinamika kompetisi antar pengusaha pribumi dan Cina di Mojokuto Jawa Timur pada jaman transisi kemerdekaan. Sukses kelompok pedagang Jawa terhambat dalam berkom-

petisi berdagang dengan pedagang-pedagang Cina. Studi senada juga dilakukan Dewey (1962) tentang bagaimana relasi sosial antar pedagang di pasar-pasar tradisional Jawa. Para isteri petani menjual hasil pertanian subsisten ke pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk menjadi pedagang kecil-kecilan ini tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit. Orang-orang Cina ini kadang berfungsi sebagai pemodal, dengan memberikan kredit kepada pedagang Jawa. Cina monopoli rokok di wilayah perkotaan Kudus pada awal kemerdekaan hingga sekarang. De Jonge (1988) menunjukkan hasil studinya di Madura, bagaimana kompetisi pemodal pribumi, yaitu para kyai dengan saudagar-saudagar Cina dalam perdagangan tembakau. Peran pemasok tembakau dari Madura sangat besar, karena struktur sosial dan jaringan mereka dibentuk secara halus, yaitu para juragan Madura/Cina menggunakan jasa tengkulak/*bandol*, yaitu pedagang perantara sesama orang Madura/Cina. De Jonge juga menunjukkan lebih separo produksi tembakau rajangan dari Madura merupakan bahan dasar pabrik rokok besar milik orang Cina, seperti Gudang Garam Kediri, Grendel, Oepet, Bentoel Malang, Nojorono Kudus, Djarum Semarang dan Sampurna Surabaya di pulau Jawa. Keberadaan

pabrik rokok ini menunjang tetap survivalnya perdagangan tembakau di Madura. Namun jumlah juragan Cina menurun, seiring tumbuh berkembangnya gerakan anti Cina, sehingga juragan dan bandol keturunan Cina lebih berkumpul sesama di Pamekasan. Sementara itu juragan dan bandol dari Madura tinggal di pantai-pantai selatan Sumenep. Mereka memasok tembakau rajangan berdasar pesanan, termasuk dari Eropa. Jaringan aliansi dagang ini mempunyai struktur piramidal, namun tauke sebagai pelanggan/pemesan tidak berpengaruh langsung dalam proses pengawasan mekanisme kerja mereka. Pengawasan hanya antar bandol saja, jika bandol/pedagang lapisan bawah maka relasinya dagang murni. Namun jika aliansi ini lebih tinggi maka relasinya antara pelindung dan klien. Ikatan aliansi ini sampai pada hutang piutang dalam berdagang, karena mereka kurang mandiri untuk modal.

Jaman Awal Kemerdekaan/Orde Lama, Robison (1986) mengatakan kekuasaan militer dengan aturan-aturannya begitu menekan sehingga membuat kondisi *social vacuum* dan masuk ke dalam sistem birokrasi. Kondisi ini mendorong pengaruh asing dan Cina kapitalis menjadi kuat terhadap hubungan negara dan kapital, sementara peran kapitalis pribumi rendah. Perwira dan prajurit terlatih

dan terpola bisnis tak lazim. Keterlibatan militer dalam kegiatan ekonomi bertujuan memperoleh pendapatan ekstra, baik untuk operasional, pendapatan pribadi maupun pembiayaan aktivitas politik. Semula militer hanya menyediakan barang secara ilegal, melalui penyelundupan pada masa revolusi, kemudian mereka lebih mengembangkan relasi dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa. Divisi Diponegoro Jawa Tengah, yaitu Angkatan Darat paling banyak dan menonjol dalam berbisnis. Divisi ini terdesak harus memenuhi kebutuhan peralatan/fasilitas militer tetapi mereka juga ingin mempunyai kehidupan dan kesejahteraan yang wajar. Kegiatan ekonomi yang menguntungkan secara kelembagaan dan juga pribadi ini berakibat Angkatan Darat ingin keadaan darurat perang terus berlanjut agar mereka tetap dapat berbisnis.

Borjuasi pengusaha pribumi tidak pada produksi karena prosesnya lebih terkonsentrasi pada perdagangan saja. Sementara pengusaha Cina konsentrasi juga pada proses produksi barang. Para birokrat, militer lebih menyukai bekerjasama dengan pengusaha Cina. Untuk itu upaya pemerintah Orde Baru pada tahun 1969-1981 memberi kesempatan pada golongan pengusaha pribumi asli, guna berkompetisi dengan golongan pengusaha Cina. Usaha ini kurang berhasil.

Permasalahan sosial politik dan kultural mulai terbelit sosio ekonomi dan politik-ekonomi yang bersifat lebih struktural. Konflik antar golongan pribumi dan Cina tentang kemakmuran dan ekonomi mengakibatkan kompleksitas permasalahan. Ternyata kesenjangan dan perbedaan ekonomi ke dua golongan tersebut tetap terjadi. Padahal pemerintah telah mengatur sirkulasi uang. Namun pihak industri tidak langsung mengikuti kebijakan ini, sehingga berdampak bagi pekerjaanya karena antar sektor saling terkait. Kemunduran pengusaha pribumi dan kemajuan pengusaha Cina karena ada perubahan dalam pola produksi. Buktinya 412 industri milik pribumi yang memperoleh lisensi, hanya 40% kapasitas produksi yang berlangsung. Akhirnya tinggal 2 orang pengusaha pribumi saja yang mampu bertahan. Akibatnya industri ini dibeli para pengusaha Cina. Kekuatan pengusaha Cina bertambah. Contoh lain industri rumah tangga batik tumbuh menjadi industri kecil sampai tahun 1970an. Kemudian muncul kapital besar dari pengusaha Cina yang mampu membangun industri besar batik cap, sehingga pengusaha batik pribumi mengalami kemunduran.

Dalam hal ini Castles (1967) menemukan bahwa karakteristik budaya pribumi hanya satu sampai dua generasi

saja, yang berpengaruh terhadap jatuhnya pengusaha pribumi, karena tiap mereka melakukan investasi usaha maka Cina dan asing langsung melakukan hal sama dengan investasi lebih besar. Sementara kelebihan pengusaha Cina adalah jaringan kekerabatan mereka dari generasi ke generasi sehingga dukungan finansial dan kapital dari keluarga dapat berlangsung terus menerus. Mereka mampu mengakumulasi kapital dari generasi ke generasi. Berbeda dengan pengusaha pribumi yang tidak saling tolong menolong dalam akumulasi kapital untuk melalui masa transisi dari kapitalisme perdagangan ke kapitalisme industri. Sarekat Dagang Islam yang berusaha berkompetisi bahkan koalisi dengan Cina nasionalis peranakan kurang mampu berkompetisi. Pengusaha Cina *totok* mampu menggunakan jaringan kredit, koleksi, import, semua perdagangan dan ritel guna investasi dalam memproduksi sendiri. Castles juga menunjukkan sukses industri rokok di Kudus karena kelas menengah berhasil menciptakan industri rokok pertamanya. Mereka berhasil menanggulangi gejolak dan tantangan perubahan sosial politik. Namun, mereka gagal membangun organisasi ekonomi yang lebih kompleks dalam mengembangkan industri kretek berikutnya, karena pengaruh keadaan

sosial politik yang berubah kembali.

Disertasi Yahya A. Muhaimin (1991) juga mengatakan bahwa kelompok pengusaha di Indonesia pada tahun 1950-1980 belum terbentuk dan malah muncul *pengusaha klien*, yaitu kelompok pengusaha swasta pribumi yang tergantung kepada penguasa/birokrat untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Perusahaan itu sesungguhnya milik pemerintah atau orang Tionghoa, namun di atas namakan orang pribumi. Pada awal kemerdekaan kepemilikan perusahaan di Nusantara selama penjajahan 344 tahun, didominasi perusahaan asing, terutama Belanda dan pedagang Cina.

Berbagai hasil penelitian lain di Jawa dan Madura menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara agama dan perdagangan. Bahkan untuk agama Islam penyebaran awalnya melalui jalur perdagangan. Semangat santri berdagang dan kompetisi dengan kelompok etnis lain juga relatif tinggi dan cakupan wilayah tidak terbatas. Mereka menjual rempah-rempah, tembakau, hasil bumi dan barang kebutuhan sehari-hari tergantung pesanan. Jika pribumi gagal berkompetisi dengan Cina, karena pengaruh sosial dan struktural sejak jaman kolonial. Studi Geertz, 1973; Ricklefs, 1991; de Jonge 1989 menunjukkan adanya korelasi antara agama Islam dan perdagangan

dalam konteks perubahan sosial politik dan sosial ekonomi. Namun disertasi Abdullah, 1994, menyangkal agama saja tidak cukup, ada faktor lain yang membuat para wirausahawan sukses adalah peluang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, baik desa maupun kota karena struktur politik setempat/ intervensi pemerintah.

Jaman Orde Baru, senada dengan Robison, hasil penelitian Crouch (1999) menunjukkan kebiasaan dagang militer dan birokrat berlangsung sampai jaman Orde Baru, di mana militer dan birokrat sebagai pejuang dan penjaga negara, sekaligus sebagai pengusaha. Kondisi ini membuat militer untung dan mereka dapat memperluas bisnis dan memperoleh keuntungan pribadi. Buktinya peran tentara/militer begitu besar dalam fungsi-fungsi administratif, politik dan ekonomi pada masa revolusi tahun 1945-1965. Kritik terhadap kajian-kajian tersebut karena kurang melihat bagaimana peran dan perilaku ekonomi dari anak-anak dan kroninya mantan pengusaha Orde Baru, yaitu Soeharto. Mereka sempat memonopoli berbagai kegiatan ekonomi perdagangan dengan hak-hak istimewa dari kebijakan pemerintah. Mereka juga bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha besar atau konglomerat Cina. Di samping itu pemerintah dalam

membuat kebijakan kurang memperhitungkan budaya pelaku-pelaku ekonomi pribumi yang lebih bergerak dalam perdagangan skala kecil dan menengah, kurang mampu membaca dan memetakan peluang ekonomi dan bagaimana terciptanya budaya pasar di Indonesia.

Aris Arif Mundayat (2007) menegaskan nampaknya orang-orang Cina tetap berusaha survive karena pengalaman mereka menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah atau politik Indonesia merupakan ancaman untuk identitas dan kelangsungan kehidupan sosial mereka. Untuk itu jaringan bisnis Cina berusaha tetap mengembangkan modal sosial dan modal budaya yang dimiliki dengan *bonding* yaitu memperkuat ikatan dan kohesi dalam kelompok jaringan sosialnya, serta memperkuat *bridging* dan *linking* baik di Indonesia, Asia Tenggara atau negara-negara lain. Berbagai kebijakan pemerintah berusaha menghapus dan menyingkirkan orang/pengusaha Cina, memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi namun pengusaha Cina tetap survive. Itu sebabnya kebijakan meningkatkan kekuatan pengusaha pribumi menjadi penting dengan tanpa menyingkirkan pengusaha Cina melalui pengembangan modal sosial yang mereka miliki, merubah orientasi nilai tentang nilai hidup terbatas menjadi

peluang dan kesempatan yang tidak terbatas. Dia mengkritik juga berbagai studi tentang orang-orang Cina lebih pada pendekatan sejarah dan politik, belum ada pendekatan antropologi tentang bagaimana masyarakat Cina berusaha survive.

Penutup

Jaringan bisnis perdagangan Cina sudah menggurita di Indonesia. Jaringan *guanxi* dan *xinyong* mereka demikian kuat dan solid. Berbagai kebijakan pemerintah, terutama sejak awal transisi kemerdekaan memperkokoh kedudukan mereka. Meskipun kebijakan pemerintah membatasi ruang gerak pedagang/pengusaha Cina pada awalnya, namun karena pedagang/pribumi sendiri kurang mengasah potensi kewirausahaannya, militer dan birokrat ikut berbisnis untuk kepentingan kelembagaan dan diri sendiri, adanya peluang-peluang ekonomi maka pengusaha/pedagang Cina tetap sukses. Apalagi jaman orde baru, kebijakannya malah melahirkan konglomerat-konglomerat Cina. Demikian juga pada jaman reformasi. Suksesnya mereka karena penguasaan jalur informasi, produksi dan distribusi barang, serta mereka mampu memanfaatkan modal sosial, budaya, ekonomi dan kebijakan pemerintah/politik yang ada. Jika pengusaha/pedagang Cina

gagal, mereka segera bangkit kembali melalui relasi jaringan *guanxinya*. Sementara pedagang/pengusaha pribumi masih menempati kelas sosial pengusaha/pedagang menengah dan bawah. Hanya beberapa birokrat dan kroni-kroni rejim Orde Baru sebagai pengusaha papan atas. Kondisi ini berlanjut hingga jaman reformasi dan pasca reformasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan (1994) *The Muslim Businessmen of Jatinom* Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
- Admosudirdjo, Prajudi (1984) *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Alatas SH. (1988) *Mitos Pribumi Malas*, Jakarta: LP3ES.
- Burger, DH (1983). *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta: PT Sinar Harapan.
- Booth, Anne, William JO'Malley, Anna Weidemann (eds) (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Carey, Peter (1986) *Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825)*, Jakarta: Pustaka Azet.
- Castles, L. (1967) *Religion, Politics and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry*, New Haven: Yale University.
- Crouch, Harold (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Terjemahan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- De Jonge, Huub (1989) *Madura, dalam Empat Zaman: Pedagang, Perekonomian dan Islam*, Jakarta: PT Gramedia.
- Dewey, Alice G. (1962) *Peasant Marketing in Java*, New York: The Free Press of Glencoe, Inc.
- Howard, Dick (1988) "Perdagangan antar Pulau, Pengintegrasian Ekonomi dan Timbulnya suatu Perekonomian Nasional" dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
- Furnivall, JS. (1944) *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, London: Cambridge University Press.
- Geertz. Clifford (1973) *Penjaja dan Raja*, Jakarta: PT Gramedia.
- Geertz. Clifford (1982) *Islam yang saya amati*. Terjemahan, Jakarta: YIIS.
- Lombart, Dennys (2000) *Nusa Jawa: Silang Budaya-Kajian Sejarah Terpadu. Bagian II: Jaringan Asia*, Jakarta: PT Gramedia.
- Muhaimin, Yahya A. (1991). *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES.
- Mundayat, Aris Arif (2007) *Etnisitas dan Jaringan Bisnis*, Yogyakarta: UGM.
- Ricklefs, MC. (2005) *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Terjemahan, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Robison, Richard & Vedi R Hadiz (2004) *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an age of Markets*, London: Routledge Curzon.
- Robison, Richard (1986) *Indonesia: The Rise of Capital*. Sidney: Allen & Unwin.
- Schrieke, B. (1960). *Indonesian Sociological Studies*, Bandung: Sumur.
- Suryo, Djoko (1998) *Masyarakat Indonesia dalam Dinamika Sejarah: Kesenambungan dan Perubahan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Suryo, Djoko (2006) *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UGM
- Van Leur, J.C. (1960) *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*, Bandung: Sumur.
- Wertheim, W.I. (1999) *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Terjemahan. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Yang, T'wang Peck (2005) *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara.